

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)

Ardiyan Natoen¹⁾ Ayu Febriyanti²⁾ Sarikadarwati³⁾ Susi Ardiani⁴⁾

Email: ardiyannatoen@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of population (total population), size (total regional assets), wealth, and Intergovernmental revenue (financial transfers from the center) affect the financial performance of district / city local governments in South Sumatra which is expressed by the financial independence ratio of local governments. The sample used in this study amounted to 15 financial statements of district / city governments in South Sumatra in 2013-2017. This sample was chosen based on the purposive sampling method. This study uses multiple regression data analysis tools with the help of computer software for SPSS version 24 statistics. The results of this study show that the variable population (total population), size (regional total assets), wealth significantly influence the financial performance of district / city governments in Sumatra South. Whereas Intergovernmental revenue does not have a significant effect on the financial performance of district / city governments in South Sumatra.

Keywords: *Population, Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Local Government Financial Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh population (jumlah penduduk), size (total aset daerah), wealth, dan Intergovernmental revenue (dana transfer dari pusat) mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dinyatakan dengan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Sampel ini dipilih berdasarkan purposive sampling method. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda dengan bantuan software komputer untuk statistik SPSS versi 24 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel population (jumlah penduduk), size (total aset daerah), wealth berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sedangkan Intergovernmental revenue tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Kata kunci : *Population, Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangan serta anggaran daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri

untuk menunjang APBD yang lebih baik adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggung-

jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Adanya tuntutan pertanggung-

jawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kerjanya.

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan yang tepat serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012).

Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera selatan tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan *operating revenues to total revenues* (tingkat kemandirian), dengan mengambil sampel laporan keuangan dan data dari badan pusat statistik pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan empat variabel independen:

Population, ukuran(*size*), Tingkat kemakmuran (*wealth*) dan Intergovernmental Revenue yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan”.

TELAAH LITERATUR

Nugroho (2014) menyatakan bahwa “karakteristik daerah memiliki pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas atau identitas dari suatu pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Dalam penelitian ini menjelaskan, karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan *Population*, Ukuran (*size*) pemerintah daerah diukur dengan total Aset, Tingkat kemakmuran (*wealth*) diukur dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan, dan *Intergovernmental revenue* diukur dari otal dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan. Berikut ini penjelasan dari masing- masing variabel:

Penduduk (*Population*)

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia.

[Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berasal dari berbagai sumber seperti:](#)

1. [Sensus penduduk \(SP\)](#)
2. [Survey penduduk antar sensus \(SUPAS\)](#)
3. [Survey sosial ekonomi nasional \(SUSENAS\)](#)
4. [Registrasi penduduk pertengahan tahun.](#)

Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh kementerian dalam negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah (*Size*), mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraph 65 ayat (a) :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.”

Ukuran (*Size*) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Maiyora (2015). Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa “Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. “ *Size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangan. Maiyora (2015) menyatakan bahwa “ Hal ini menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Sama halnya dengan pendapat Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “Semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai ukuran (*size*) pemerintah daerah.

Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) Daerah

Abdullah (2004) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah merupakan 2 (dua) unsur penting dari konsep PAD.

Intergovernmental Revenue

Desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahannya.

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. *revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto, 2011).

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta

4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas (Mardiasmo, 2018) ialah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran^[1]
Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset *non-* keuangan, pembiayaan, dan *non-*anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan^[2]

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.^[3] Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22 (PP No. 24/2005) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pernyataan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 1 Menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Keuangan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tujuan laporan keuangan menurut SAP (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi , dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2013).

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang. Setiap organisasi berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia. Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*), dan rasio utang terhadap belanja. Pengukuran kinerja non keuangan organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, Mahmudi (2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{P A D}}{\text{bantuan Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio diatas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini karena hubungan karakteristik pemerintah daerah dan rasio kemandirian berkesinambungan dalam perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat kemandirian di kabupaten/kota Sumatera Selatan terkhusus tahun 2017 terjadi fluktuasi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Dengan mengambil sampel sebanyak 15 pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laporan realisasi anggaran dan laporan neraca tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran dan laporan neraca pemerintah daerah kab/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif menunjukkan jumlah data (N) pada penelitian ini sebanyak 75, diperoleh dari 15 Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dikalikan dengan tahun yang digunakan dalam penelitian, yakni tahun 2013-2017. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum di dalam tabel, sedangkan nilai tertinggi dari data ditunjukkan oleh skor maximum. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data, dan std.deviation menunjukkan simpangan baku. Penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Variabel Population pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 109970,5936 dengan tingkat standar deviasi 396464,18060. Populasi terendah dengan skor 131,11 adalah Kota pagaralam pada tahun 2013, sedangkan populasi tertinggi dengan skor 1623099,00 adalah Kota Palembang pada tahun 2017.

Variabel Ukuran (*size*) Daerah pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 28,8800 dengan tingkat standar deviasi 0,91085. Ukuran daerah terendah dengan skor 27,80 adalah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2014, sedangkan ukuran daerah tertinggi dengan skor 33,52 adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2013.

Variabel Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0,0946 dengan tingkat standar deviasi 0,11959. Tingkat Kemakmuran terendah dengan skor 0,0008 adalah Kota Pagaralam pada tahun 2017, sedangkan Tingkat kemakmuran tertinggi dengan skor 0,90150 adalah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015. *Variabel Intergovernmental Revenue* pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0,7454 dengan tingkat

standar deviasi 0,14797. *Intergovernmental Revenue* terendah dengan skor 0,00840 adalah Kota Pagaralam pada tahun 2017, sedangkan *Intergovernmental revenue* tertinggi dengan skor 0,92870 adalah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013.

Variabel Kinerja pemerintah daerah pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 5197229,8080 dengan tingkat standar deviasi 6945988,63900. Kinerja pemerintah daerah terendah dengan skor 0,001105 adalah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016, sedangkan ukuran daerah tertinggi dengan skor 35049415,00 adalah Kota Palembang pada tahun 2014.

Uji Asumsi Klasik

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak, karena model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas residual uji One Sample Kolmogorov Smirnov Tabel menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov:

Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Asymp.Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka residual pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk melihat apakah pada model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Jika didapat nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada masalah autokorelasi atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Tabel menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson (DW test)*.

Berdasarkan table diketahui nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,391. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau $0,391 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi .

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)

Coefficientsa	Unstandardized Coefficients	t	Sig.	
Model				
		Std. Error		
B (Constant)	-25001855.150	10582030.290	-2.363	.021
X1	-7.861	1.003	-7.840	.000
X2	1026324.988	363444.529	2.824	.006
X3	7133531.268	2836901.039	2.515	.014
X4	667709.537	2389332.294	.279	.781

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Uji t di gunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel-variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Penjelasan pada bab III menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t tabel dan t hitung. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik t (lihat lampiran) pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $75-4-1 = 70$, sehingga diperoleh t tabel 1,667/ -1,667.

Pengambilan keputusan hasil uji t dilakukan dengan merumuskan hipotesis statistik terlebih dahulu yang merupakan

Dengan demikian, masalah autokorelasi tidak dapat terselesaikan dengan Durbin Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adjusted R²). Dari Tabel 4.8 dapat dilihat nilai adjusted R² sebesar 0,503. Hal ini berarti 50,3% variasi variabel terikat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu *Population*, ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, dan sisanya sebesar 49,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

pengembangan dari hipotesis penelitian pada Bab II. Hipotesis statistik dan hasil uji t dengan rasio kemandirian yakni: nilai t hitung *Population* sebesar -7.840 sehingga $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $-1,667 < -7,840 < 1,667$ dengan tingkat signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Population* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Nilai t hitung Ukuran daerah sebesar 2,824 sehingga $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ $2,824 > 1,667$ dengan tingkat signifikansi 0,006 yang kurang dari 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*)

daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

nilai t hitung Tingkat kemakmuran (*wealth*) sebesar 2,515 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,515 > 1,667 dengan tingkat signifikansi 0,014 yang kurang dari 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan table nilai t hitung *Intergovernmental revenue* sebesar 0,279 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-1,667 < 0,279 < 1,667$ dengan tingkat signifikansi 0,781 yang lebih dari 0,05 maka H01 diterima dan Ha1 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5864553453	4	1466138363	18.941	.000b
Residual	5186305744	6	7740754842		
Total	1105085920	7			
		71			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), intergovernmental, size, wealth, population

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variable independen dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Tabel menunjukkan hasil uji F yang dihitung dengan rasio kemandirian

Pengambilan keputusan hasil uji F dilakukan dengan merumuskan hipotesis statistic terlebih dahulu yang merupakan pengembangan dari hipotesis penelitian

Penjelasan menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 18.941. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik F (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variable-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau $75-4-1=70$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable independen) sehingga diperoleh F tabel sebesar 2.503 . Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18.941 > 2,503$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 maka Ho5 ditolak dan Ha5 diterima . Jadi dapat disimpulkan bahwa Population, Ukuran (size) daerah, Tingkat kemakmuran daerah dan Intergovernmental revenue secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan Pengaruh *Population* terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel dapat disimpulkan bahwa *Population* atau jumlah penduduk dalam penelitian ini bernilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $-1,667 < -7840 < 1,667$ yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012) yang mengungkapkan bahwa *Population* berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebuah daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sehingga pemda harus bekerja lebih keras dan mengalokasikan belanja dengan baik agar dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan

mendorong semakin tingginya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penganggaran khususnya.

Pengaruh Ukuran (*size*) daerah terhadap Kinerja pemerintah daerah

Hasil uji t pada tabel menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural (\ln) dari total aset, secara parsial berpengaruh signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai t hitung $> t$ tabel atau $2,824 > 1,667$ menunjukkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan arah yang positif, yang artinya bahwa total aset berperan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sumarjo, 2010) dan (Kusumawardani, 2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. (Kusumawardani, 2012) menyatakan bahwa *size* yang besar dalam pemerintah akan mempermudah dalam memberi kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. (Kusumawardani, 2012) juga menyatakan bahwa kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Besarnya ukuran daerah juga memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitasnya. (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan lebih besar pula dari publik untuk melakukan pengungkapan. Tuntutan yang besar dari masyarakat ini terjadi karena dengan semakin besarnya ukuran daerah maka resiko terjadinya penyalahgunaan akan semakin besar pula. Besarnya tuntutan dari publik akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja, sehingga laporan yang diungkapkan kepada masyarakat merupakan laporan yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah telah baik. Jadi dapat dinyatakan bahwa dengan jumlah aset pemerintah daerah yang tinggi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah terhadap kinerja pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel didapatkan hasil bahwa tingkat kemakmuran daerah yang diukur dengan PAD terhadap total pendapatan, secara parsial berpengaruh signifikan sebesar $0,014 < 0,05$ terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t, variabel Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah yang memiliki t hitung $> t$ tabel atau $2,515 > 1,667$ dengan yang berarti H_0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan latar belakang teori yang dijelaskan oleh Florida (2007) dalam Nugroho dan Rohman (2012) menyatakan bahwa jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. (Sumarjo, 2010) juga mengatakan bahwa peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro, pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersama-sama investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan (Kurniasih, 2011) mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa, bahwa tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maiyora, 2015) bahwa "Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan". Namun, (Anzarsari, 2014), Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, (Julitawati, 2012) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota. Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin besar PAD,

maka kinerja keuangan Pemerintah daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya .

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental revenue* yang diukur dengan total dana perimbangan terhadap total pendapatan, dengan tingkat signifikan sebesar $0,781 > 0,05$ dengan t tabel $< t$ hitung $< t$ tabel atau $-1,667 < 0,279 < 1,667$ yang berarti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis empat (H4) penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masdiantini dan Erawati (2016), yang menyimpulkan bahwa *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), yang menyimpulkan bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Tidak berpengaruhnya *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja pemerintah daerah dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal penggunaan dana perimbangan yang di alokasikan oleh pemerintah daerah. Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum .

Pengalokasian dana perimbangan terhadap belanja daerah yang sedikit membuat pembangunan daerah minim, sehingga menyebabkan pemberian layanan kepada masyarakat menjadi terhambat dan peran dana perimbangan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah tidak berfungsi sebagaimana mestinya .

Pengaruh *Population*, Ukuran (*size*) daerah , Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa *Population*, Ukuran (*size*) daerah, Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan

Intergovernmental revenue secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dengan F hitung $> F$ tabel atau $18,941 > 2,503$ dengan demikian hipotesis lima (H5) dalam penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang dijelaskan dengan *Population*, Ukuran (*size*) daerah , Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahwa, *Population* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didapat hasil signifikan $0,000 < 0,05$ dengan -t tabel $< t$ hitung $< t$ tabel atau $-1,667 < -7,840 < 1,667$ yang berarti *Population* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, semakin banyak populasi pada suatu kabupaten/kota akan membuat kinerja keuangannya menurun Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebuah daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sehingga pemda harus bekerja lebih keras dan mengalokasikan belanja dengan baik agar dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
2. Bahwa, Ukuran (*size*) daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah $0,006 < 0,05$ dengan t hitung $> t$ tabel atau $2,824 > 1,667$ yang berarti Ukuran (*size*) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, ukuran (*size*) daerah yang besar dalam pemerintah akan mempermudah dalam memberi kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

3. Bahwa, Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah hasil didapat signifikan $0,014 < 0,05$ dengan t hitung $> t$ tabel atau $2,525 > 1,667$ yang berarti Tingkat kemakmuran (*wealth*) daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro, pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersama-sama investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur suatu daerah.
4. Bahwa, *Intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didapat hasil signifikan $0,781 < 0,05$ dengan $-t$ tabel $< t$ hitung $< t$ tabel atau $-1,667 < 0,279 < 1,667$ yang berarti *Intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bahwa, *Population*, Ukuran (*size*) daerah , Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah hasil didapat signifikan $0,000 < 0,05$ dengan F hitung $> F$ tabel atau $18,941 > 2,503$ yang berarti *Population*, Ukuran (*size*) daerah , Tingkat Kemakmuran (*wealth*) daerah dan *Intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat menggali potensi PAD yang terdapat di masing-masing daerah mengingat terkait dengan PAD masih sangat kecil dibandingkan pendapatan secara keseluruhan.
2. Sebaiknya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat merealisasikan belanja daerah dengan baik mengingat terkait dengan Pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota .

3. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan dapat menggunakan dana perimbangan dari pusat dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dan juga belanja daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel lain seperti Belanja daerah, Belanja modal dan temuan audit .
5. Penelitian ini menggunakan data LKPD hanya sampai tahun 2017 dan sampel penelitian 15 kabupaten/kota . Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota atau seluruh provinsi di Indonesia dengan menambahkan tahun pengamatan sebelumnya , sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anzarsari, Desy. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013-2017*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. *Sumsel Dalam Angka Tahun 2013-2017*. Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. *Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017*: Badan Pusat Statistik.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* suatu Pengantar , Edisi Ketiga .
- Darmanto. Habib Chandra 2012. *Pengaruh Population, Employment, Size, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996
- Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Maiyora, Gita. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. *Journal Ilmiah*, 2, 2-14.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. (Unit Penerbit: YKPN, Ed.)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI .
- Marfiana nandhya, I. k. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerntah Daerah dan hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* .
- Sesotyaningtyas, M. (2012). *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* , *Jurnal Accounting analysis* .
- Patrick. (2007). The Determinant of Organizational Inovativeness : The Adoption of GASB 34 in Pennysylvania Local Government Unpublished Ph.D Dissertation.
- Suhardjanto, D. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal ilmiah* , 8 (1), 32.
- Nandhya, M., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Kuenagan Pemerintah Daerah.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods for business*.
- Priyatno, Duwi. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah data bagi mahasiswa & Umum*. ANDI.